



ASPIKOM



KOMUNIKASI DALAM KERAGAMAN



Kata Pengantar
Dr. Imini Darmastuti, M.Si
Ketua Panitia Lustrum ASPIKOM 2017

Editor:
Agung Prabowo

KOMUNIKASI DALAM KERAGAMAN

© ASPIKOM

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama, 2017
308 hal (vi+ 302 hlm). ; 15.5 x 23.5 cm
ISBN: 978-602-6751-82-9

Penulis

Kata Pengantar

Dr. Rini Darmastuti, M.Si
Ketua Panitia Lustrum ASPIKOM 2017

Editor:

Agung Prabowo

Diterbitkan oleh:

Buku Litera Yogyakarta
Minggiran MJ II/1378, RT 63/17
Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta
Telp. 0274-388895, 08179407446
Email: bukulitera@gmail.com, bukulitera2@gmail.com

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
----------------------	-----

Komunikasi dan Toleransi

Ilmu Komunikasi: Peluang dan Tantangan Masa Depan

<i>Ali Nurdin</i>	1
-------------------------	---

Agama, Komunikasi, dan Toleransi

<i>Turnomo Rahardjo dan Triyono Lukmantoro</i>	21
--	----

Komunikasi Konflik dan Gejala Intoleransi di Indonesia

Studi Kasus Intoleransi dalam Kebebasan Beragama

dan Berkeyakinan di Provinsi Jawa Barat

<i>Ilham Gemiharto dan Atwar Bajari</i>	41
---	----

Menyatukan Kebhinekaan melalui Seni-Budaya Sunda

<i>Santi Susanti, Dian Sinaga dan Fitri Perdana</i>	57
---	----

Komunikasi dalam Ragam Budaya

Gendhu Gendhu Rasa: Tradisi Lisan Masyarakat Adat Bonokeling

<i>Vincentia Ananda AP</i>	77
----------------------------------	----

Strategi Komunikasi Etnis Minang Untuk Bertahan Hidup di Pasar Nusukan Surakarta

<i>Betty Gama, Yoto Widodo dan Hariyanto</i>	85
--	----

Kearifan Lokal Remaja Perkotaan dalam Terpaan Media Baru di Sulawesi Tenggara

<i>M. Najib Husain dan Dewi Anggraini</i>	99
---	----

Permainan Tradisional Anak sebagai Media Komunikasi Budaya dalam Mendukung Pengembangan Kota Layak Anak di Kota Kendari

<i>Marsia Sumule Genggong dan Ashmarita</i>	117
---	-----

Perilaku Komunikasi Antar Budaya Mahasiswa Indonesia (Studi pada Peserta De-Centralized Asian Transnational

Pangan Indonesia terhadap Negara Lain

Wien Kuntari 295

Telaah Fungsi dan Kontrol Media Komunitas

Terhadap Pembangunan di Tengah Arus Media Baru:

Studi Pada Media Komunitas Speaker Kampung (Lombok Timur,
Nusa Tenggara Barat) dan Pendowo FM (Sidoarjo, Jawa Timur)

Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.

dan Ranggabumi Nuswantoro, M.A.

Komunikasi
dan Toleransi

Telaah Fungsi dan Kontrol Media Komunitas Terhadap Pembangunan di Tengah Arus Media Baru: Studi Pada Media Komunitas Speaker Kampung (Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat) dan Pendowo FM (Sidoarjo, Jawa Timur)

¹Drs. Mario Antonius Birowo, M.A., Ph.D.

²Ranggabumi Nuswantoro, M.A.

¹Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

✉ mbirowo@yahoo.com

²Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

✉ ranggabumi_nuswantoro@mail.uajy.ac.id

Pendahuluan

Pembangunan yang berkeadilan mensyaratkan partisipasi dan keterlibatan warga di dalamnya, terutama dalam pengambilan keputusan soal apa dan bagaimana pembangunan itu dilakukan. Warga berhak tahu arah dan tujuan pembangunan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, berapa anggaran yang dibutuhkan, termasuk transparansi penggunaan anggarannya. Penelitian ini melihat kondisi awal yang menarik, yakni soal apa dan bagaimana warga terlibat di dalam pembangunan, terutama di dua media komunitas yakni Speaker Kampung & Pendowo FM.

Speaker Kampung dan Pendowo FM merupakan dua diantara sekian banyak media komunitas yang ada di Indonesia. Speaker Kampung beralamat di Jalan Wisata Lemor, Dusun Montong gedeng, Desa Ketangga, Kecamatan Suela. Kabupaten Lombok timur, NTB, sementara Pendowo FM di Jl Gajah Mada 336 RT 10/RW 04, Dusun Semawut, Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Keduanya memiliki persamaan yakni menggunakan mulai menggunakan internet untuk mengoptimalkan kegiatan bermedianya. Penelitian ini akan melihat beberapa hal yakni: 1) bagaimana warga berproses mendirikan Speaker Kampung dan Pendowo FM sebagai media komunitas, serta mulai menggunakan internet, 2) sejauh mana Speaker Kampung dan Pendowo FM berperan dalam mengontrol pembangunan di daerah, terutama supaya

pembangunan juga memberdayakan potensi-potensi lokal daerah? 3) Bagaimana Speaker Kampung dan Pendowo FM mendorong dinamika Sistem Informasi Desa setempat?

Kajian Literatur

Media Komunitas & Pembangunan

Pustaka mengenai media komunitas bersifat cair dan tidak bernarasi tunggal. Walau demikian terdapat beberapa konsep media komunitas dari berbagai ahli yang bisa dijadikan rujukan, termasuk bagaimana posisi media komunitas terhadap pembangunan. Salah satunya dari Asosiasi penelitian media dan komunitas internasional (*International Association of Media and Communication Research* [IAMCR]). IAMCR memberi ciri bahwa media komunitas berasal, bersirkulasi dan beresonansi dalam masyarakat sipil, yakni ruang media komunikasi yang eksis di luar negara dan pasar (kerap kali independen dan nonprofit), meskipun tak menutup kemungkinan bagi media komunitas untuk berinteraksi dengan keduanya (IAMCR, dikutip dari Rennie 2006: 4).

Rennie juga mendefinisikan media komunitas dalam konteks masyarakat sipil. Media komunitas harus dilihat sebagai alat untuk mengelola maupun mengembangkan masyarakat sipil oleh masyarakat sipil itu sendiri. Masyarakat sipil adalah entitas yang terpisah dari negara, meskipun dalam banyak hal entitas ini perlu berhubungan dengan negara agar tetap eksis. Hubungan dengan negara ini pun berlaku bagi media komunitas, yang sekaligus membedakan posisi media komunitas dengan jenis media lain, misalnya *zine* maupun bentuk media lain yang bisa eksis tanpa perlu mengkhawatirkan regulasi media (oleh negara).

Penegasan posisi media komunitas dengan negara juga ditunjukkan dari konsep yang dikemukakan oleh Combine Resources Institution (CRI). CRI sendiri selama ini tidak memiliki definisi ketat dalam menyebut komunitas. Dalam konsep CRI, media komunitas bisa muncul dalam ruang geografis tertentu (misalnya desa, dusun, kampung, dsb.) maupun di komunitas yang memiliki kesamaan kepentingan. Secara implisit, CRI selama ini mendorong perkembangan media komunitas bagi warga negara yang termarginalkan, utamanya oleh kebijakan

negara. Oleh karena itu, CRI mengamini bahwa media komunitas adalah media perlu ada sebagai ruang yang steril dari *negara* dan *pasar*, meskipun dalam ruang itu media komunitas tetap bisa berhubungan dengan keduanya.

Walau terkesan berjarak dengan negara namun sejatinya media komunitas menjadi bagian dari negara itu sendiri. Sebab anggota media komunitas merupakan warga negara yang tinggal dan menghidupi wilayahnya, termasuk memberikan sumbangan pemikiran maupun kritik terhadap proses pembangunan. Mengenai relasi antara media komunitas dengan pembangunan, terdapat konsep yang dikemukakan oleh Pawito sebagai berikut: media komunitas (*community media*) merupakan jenis media (cetak maupun elektronik) yang hadir di dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu dan dikelola oleh dan diperuntukkan bagi warga komunitas tertentu. Karakter utama dari media komunitas dengan demikian adalah (a) memiliki jangkauan terbatas (lokal), (b) menampilkan isi yang bersifat kontekstual mengacu kondisi komunitas, (c) pengelola serta target adalah orang-orang dari komunitas yang sama, dan (d) hadir dengan misi melayani - tidak ada orientasi mencari keuntungan modal (Pawito, 2007). Dari pengertian tersebut bisa ditekankan bahwa lokalitas menjadi ciri utama dari media komunitas. Lokalitas tersebut terwujud dalam segala aspek yang muncul dari media komunitas, mulai dari *content*, redaksional, hingga operasional. Sifatnya yang nonprofit membuat media komunitas lebih leluasa bergerak melayani kepentingan warga, tanpa risau diintervensi oleh kepentingan pemodal.

Dalam konteks pembangunan daerah, berkenaan apa media komunitas terutama memiliki signifikansi, maka upaya pemberdayaan dan aktualisasi potensi-potensi lokal menjadi hal yang sangat utama. Pembangunan daerah dengan demikian tidak harus diartikan sebagai kemandirian masyarakat suatu daerah (atau para warga suatu komunitas) - dalam arti tidak memiliki ketergantungan dengan daerah lain (atau dengan para warga komunitas lain) tetapi yang lebih penting adalah apresiasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi dan produk-produk lokal (daerah) demi lebih tercukupinya kebutuhan warga daerah. Pembangunan daerah dengan demikian diharapkan dapat memperkokoh nilai-nilai budaya lokal (daerah) yang selanjutnya juga dapat memperkokoh nilai-nilai dan identitas budaya bangsa (Pawito, 2007).

Media Baru

Terdapat banyak teori, konsep, dan pemikiran mengenai media baru. Menurut Leah A. Lievrouw & Sonia Livingstone (2011: 7) definisi media baru adalah sebagai berikut:

"To begin with, we define new media as information and communication technologies and their social contexts, which include three main components:

- (1) the material artifacts or devices that enable and extend people's abilities to communicate and share meaning;*
- (2) the communication activities or practice that people engage in as they develop and use those devices; and*
- (3) the larger social arrangements organizational forms that people create and build around artifacts and practices."*

Dalam pemikiran Lievrouw & Livingstone, kekhasan media baru nampak dalam tiga hal yakni soal materi, praktek komunikasi, dan pengorganisasian sosial. Dimulai dari materi baru lalu muncullah ruang baru yang membuat proses berinteraksi dan berkomunikasi jadi lebih mudah. Selanjutnya muncul pengorganisasian yang membuat proses tersebut menjadi terstruktur dan sistemik. Selanjutnya muncullah organisasi, kelompok, atau grup berbasis media baru.

Ahli lain yakni Glen Creeber dan Royston Martin memiliki pendapat berbeda. Creeber dan Martin (2009: 2) merujuk pada ensiklopedi gratis berbasis internet, Wikipedia (yang merupakan produk dari media baru) mendefinisikan media baru sebagai produk teknologi komunikasi yang hadir bersama-sama dengan komputer digital. Sebelum tahun 1980-an media diandalkan terutama pada cetak dan model analog seperti koran, televisi, bioskop, dan radio. Sekarang dunia memiliki radio digital, televisi dan bioskop, sementara bahkan mesin cetak telah telah diubah oleh teknologi digital yang baru seperti perangkat lunak manipulasi gambar seperti Adobe Photoshop dan alat-alat *desktop publishing*. Beberapa teknologi yang masuk kategori media baru adalah Internet dan World Wide Web, televisi digital, film digital, *Personal Computer* (PC), DVD (Digital Versatile Disc atau Digital Video Disc), CD (Compact Disc), media portabel players (seperti MP3 Player), ponsel (atau cell) phones, video (atau komputer) game, *Virtual Reality* (VR), *Artificial Intelligence* (AI).

Dalam perspektif Creeber dan Martin media baru mungkin bukan istilah yang ideal untuk menyebut teknologi komunikasi baru. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebaruan menjadi unsur pokok dalam transformasi teknologi komunikasi tersebut. Terdapat beberapa perbedaan utama antara media analog dan media baru. *Pertama*, media baru melampaui teknologi analog dalam kemudahan dipindahtangankan satu satu platform ke platform media lainnya. Data dapat disimpan dan diakses dari jarak jauh dan didistribusikan. *Kedua*, data digital juga lebih mudah untuk dikreasi dan hasil akhirnya dapat direproduksi tanpa batas dan kehilangan kualitas di dalam media baru. Singkatnya, bahan digital melebihi sistem analog dalam hal kecepatan, kualitas, dan kinerja.

Media digital atau media baru tidak hanya memunculkan fisik teknologi informasi dan komunikasi yang baru, namun juga cara berpikir baru. Beberapa ahli menyebut kebaruan ini sebagai revolusi digital, kebaruan digital yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Creeber dan Martin memberi catatan bahwa revolusi digital adalah istilah yang baru-baru ini dipakai untuk menggambarkan efek dari penurunan biaya dan ekspansi dari perangkat digital seperti komputer dan telekomunikasi. Dengan kedatangan media digital, dunia ini bisa dibayangkan berubah begitu pula dengan cara kita berpikir tentang diri kita sendiri dan planet ini (memang alam semesta). Secara khusus, budaya digital dikaitkan dengan percepatan perubahan sosial.

Demokrasi Digital

Era digital ditandai dengan kemunculan internet. Teknologi digital berubah secara fundamental dari komputasi untuk komunikasi. Transformasi ini mencapai masa kritis di awal tahun 1990-an ketika internet menjadi sarana komunikasi yang dapat diandalkan di antara individu. Hal ini memungkinkan orang membuat konten yang lebih baik dan lebih kaya dengan menggabungkan kata-kata tertulis dengan suara dan video. Jika biasanya pesan dikonversi dalam bentuk tertulis, suara, atau audiovisual, maka internet memungkinkan orang merangkai pesan dari ketiga unsur yang ada. Sebagaimana dinyatakan oleh David Winston (2003):

"This gave people the ability to create better and richer content by combining the written word with voice and video. Additionally,

content became data and could be searched for important bits of information. Suddenly, millions of documents were searchable instead of having to look up indexes in books or review video or audiotapes."

Orang kini mencari data tidak lagi dalam bentuk indeks di buku, atau review kaset audio maupun video, melainkan dalam bentuk digital yang dengan mudah diketikkan di website pencari data seperti Google atau Yahoo.

Dalam kaitannya dengan politik dan demokrasi, menurut Winston setidaknya terdapat empat hal yang membedakan dunia digital dengan dunia lama (2003: 135-136):

Pertama, dalam hal ini *age of reason* baru. Komunikasi digital akan memberdayakan individu dengan mengorbankan elit, artinya proses penyampaian informasi politik lebih independen dan tidak tergantung kekuasaan elit (yang mungkin menguasai media).

Kedua, media komunikasi baru ini akan bergerak dengan kecepatan yang hampir tidak bisa dipahami. Tenggat waktu menjadi tidak relevan lagi atau dalam kenyataannya, tidak ada. Permintaan akan berita *real time* meningkat drastis. Media-media konvensional mulai bergerak mendekati digital, atau setidaknya bermain di dua kaki yakni mempertahankan bentuk konvensionalnya (*print media* atau *broadcast media*) namun masuk ranah digital lewat internet (*website*, *social media*, *live streaming*, dan sebagainya).

Ketiga, dengan meningkatnya kecepatan komunikasi, maka warga di dunia digital akan menuntut informasi politik yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka, baik sisi teknis (medianya) maupun substansinya, untuk menentukan langkah dalam suatu pemilihan umum. Kenyamanan individu akan menjadi bagian integral percakapan politik di masa depan.

Keempat, masyarakat akan mengalami ledakan informasi politik. Mulai dari informasi yang dibagikan oleh media konvensional hingga media digital. Jika tidak dikelola maka ledakan informasi ini akan menjadi kontraproduktif bagi pengembangan demokrasi di masa depan.

Keempat kebaruan politik dan demokrasi dalam konteks

dunia digital di atas membuktikan pernyataan Franklin Roosevelt bahwa "Demokrasi bukanlah hal yang statis." Dunia digital akan membawa politik dan demokrasi lebih dinamis, sebab dunia digital memberi kesempatan kepada orang-orang untuk menyampaikan dan mendiskusikan ide-idenya. Individu tidak lagi bergantung kepada elit. Demokrasi akan semakin kuat sebab basisnya adalah individu yang memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Pemikiran Winston di atas nampaknya sejalan dengan Barry N. Hague dan Brian D. Loader (1999: 4), ilmuwan komunikasi politik dari Universitas Tescide Inggris, mengenai perubahan paradigma demokrasi di era digital. Lembaga-lembaga politik saat ini berada dalam kondisi lemah dan performanya buruk. Ditandai dengan semakin banyaknya aktor-aktor politik yang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan publik: korupsi, kolusi, suap, dan skandal kekuasaan. Munculnya era digital atau era informasi, memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali dan, jika perlu, secara radikal merombak atau mengganti mereka yakni lembaga-lembaga politik, termasuk aktornya, yang tidak kredibel dan berkualitas. Era ini mengakhiri era perwakilan demokrasi di abad ke-20.

Metode Penelitian

Dilihat dari isu yang akan dijawab yakni telaah fungsi dan peran media komunitas terhadap pembangunan, maka penelitian ini digolongkan penelitian kualitatif, dengan paradigma konstruktivis dan strategi penelitian *participant observation* (Hamilton dalam Denzin & Lincoln 1994: 63). Metode penelitian di sini menjadi pegangan operasional untuk mencari dan menganalisis data, khususnya data yang berkaitan dengan topik yang diusulkan. Dalam penelitian ini data dispesifikkan berupa dokumen dari media komunitas, dokumen administrasi warga/komunitas, peralatan media komunitas, isu-isu komunitas, dan sebagainya.

Sebagaimana dirancang oleh Denzin & Lincoln (1994: 14-15), penelitian kualitatif berparadigma konstruktivis menggunakan data/temuan lapangan sebagai alat/bahan untuk membangun teori/konsep. Maka urutan pengambilan datanya sebagai berikut:

1. Studi literatur
Mempelajari dokumen terkait media komunitas yang menjadi objek penelitian, juga data administrasi masyarakat/komunitas yang dituju. Mengidentifikasi dengan lebih detail kebutuhan data untuk penelitian
2. Observasi
Melakukan pengamatan terhadap objek penelitian, menggali data dari sumber-sumber primer terutama identifikasi isu dan permasalahan seputar topik penelitian. Selain itu juga melihat fasilitas (fisik) media komunitas
3. FGD
Diskusi terbuka berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya (pengolahan saat proses studi literatur dan observasi). FGD menjadi ruang bagi peneliti untuk menajamkan isu yang muncul berdasarkan pengalaman personal objek yang diteliti.
4. *Indepth interview*
Memilih person-person dalam komunitas yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, menemui dan menanyai lebih lanjut. Daftar pertanyaan disiapkan sebelumnya dari hasil pengolahan FGD.
5. Interpretasi data
6. Data yang dianggap cukup oleh peneliti kemudian diinterpretasi menggunakan teori/konsep yang sebelumnya telah ditetapkan di proposal. Namun dimungkinkan peneliti menumculkan pemikiran baru yang dikembangkan dari proses penelitian yang telah berjalan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Speaker Kampung

1. Kemandirian

Speaker Kampung menjalankan kegiatannya berdasar pada kemandirian. Mereka menjalankan suatu usaha untuk membiayai operasional media komunitasnya. Eros menceritakan saat mereka

membuat Buletin Speaker Kampung, mereka mengadakan usaha studio foto. "Saya buat studio, kita di buletin setiap perbulan diterbitkan, dari dananya itu kita bisa buat buletin itu dengan berapa kali cetak printer". Melalui kreatifitasnya, mereka berusaha menangkap berbagai peluang di sekitar mereka. Berbagai acara yang dilayani dengan jasa foto antara lain: wisuda taman kanak-kanak, pembuatan kartu tanda penduduk. Hasil dari jasa tersebut digunakan untuk membiayai pencetakan dan operasional buletin Speaker Kampung. Setiap terbit, Speaker Kampung dicetak 30-50 eksemplar yang dibagikan ke berbagai tempat (wawancara dengan Eros, 17 Januari 2017).

Kemandirian ini sampai sekarang tetap dilakukan dalam pengelolaan Speaker Kampung. Setiap ada kegiatan yang mendatangkan pemasukan sebagian digunakan untuk pembiayaan. Soal pembiayaan ini, ada rencana aktivis Speaker Kampung untuk beternak agar memperoleh pemasukan yang rutin.

2. Partisipasi dalam Pengawasan Pembangunan

Warga harus mendapat informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah yang terkait dengan kepentingan warga. Transparansi merupakan syarat utama untuk mengkontrol proses pembangunan terhindar dari praktek korupsi dan salah urus. Untuk menjamin informasi bisa mengalir ke warga dan aspirasi warga bisa didengar pemerintah, maka aktivis Speaker Kampung melihat bahwa warga harus melakukan tindakan aktif, yang antara lain dengan memanfaatkan media komunitas. Dalam bagian ini, peneliti akan menguraikan kiprah Speaker Kampung dalam mendorong transparansi di wilayahnya.

Beberapa isu yang menjadi perhatian mereka adalah pembangunan fisik berupa sekolah, jalan, kesehatan, pernikahan dini, pemilihan kepala desa, pelestarian budaya Sasak, lingkungan hutan, pengawasan proyek pembangunan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri). Liputan soal PNPM Mandiri pernah membuat Eros dilaporkan ke pihak berwenang. Peristiwa tersebut bermula dari tulisan Eros tentang pengelolaan PNPM di tahun 2010 yang diunggah ke web Rumah Alir, sebuah web yang ditujukan bagi sistem informasi komunikasi Kongres Sunda Kecil (Bali, NTT, NTB, Maluku dan Maluku Utara). Melalui tulisannya, Eros bermaksud untuk mendorong keterbukaan informasi. Tulisan tersebut baru diperkarakan

pada tahun 2012, dan diancam akan dilaporkan ke polisi. Tulisan Eros dianggap membunuh karakter pengurus PNPM. Selain itu, tulisan tersebut dianggap dapat menghambat pembangunan karena dana PNPM untuk desa Ketangga bisa tidak dicairkan.

Eros kemudian dipanggil oleh Forum Komunikasi PNPM, pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten. Kasus ini cukup membuat shock yang bersangkutan, walau Eros sendiri berusaha tenang karena ia merasa benar sesuai hukum. Apalagi ia merasa sudah menjalankan prinsip jurnalistik yang seimbang, dengan mencari informasi dari berbagai sumber saat menulis artikel tersebut. Ketika menghadapi kasus ini, Eros merasa pengetahuan hukum yang dimilikinya (ia seorang sarjana hukum) serta penggunaan prinsip jurnalistik sangat membantunya.

Untuk mendukung posisinya, Eros sempat berkomunikasi dengan Muhammad Syairi, salah seorang aktivis radio komunitas Primadona FM, desa Karang Bajo, Lombok Utara. Syairi memberi semangat kepadanya untuk yakin atas langkah yang sudah dilakukannya. Menurut Syairi, yang penting sudah melakukan konfirmasi. Saat itu radio komunitas masih berjalan. Pada tahun 2014, radio komunitas Ninanta FM melakukan liputan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, walau nampaknya tidak terlalu ditanggapi pengurus PNPM Mandiri, misalnya tidak hadir pada undangan talkshow di radio tersebut karena suatu hal.

"Seperti acara talk show di radio kami sering mengundang pelaku PNPM, namun sering tidak menghadirinya" Jelas Ingkong saat dikonfirmasi 26/3/2014 (Kampung Media, 29/3/2014). Namun untuk memenuhi akses terhadap informasi, relawan radio melakukan wawancara langsung dengan pengurusnya. Menurut Eros, liputan tersebut membawa dampak terhadap pengelolaan PNPM. Pihak desa ikut mencermati PNPM, karena sebelumnya pihak desa tidak pernah ikut campur tangan (wawancara dengan Eros, 18 Januari 2017).

Dampak dari liputan jurnalisme warga bisa dilihat dari desakan untuk memperbaiki fasilitas jalan di Bilakembar. Bilakembar merupakan bagian dari desa Suela, satu kecamatan Suela dengan Desa Ketangga. Sebelum tahun 2015, jalan menuju Bilakembar dalam kondisi buruk sehingga mobilitas warga terhambat. Melihat kondisi

yang demikian, Speaker Kampung melakukan liputan atas situasi tersebut untuk menarik perhatian pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Speaker Kampung ingin mendorong perubahan terhadap kondisi jalan tersebut sehingga dirasa perlu untuk menaikkannya ke dalam liputannya. Liputan tersebut berhasil menggugah pemerintah daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan. Melalui gotong royong masyarakat dan dukungan pemerintah, akhirnya kondisi jalan yang menembus Bilakembar berubah baik. Saat penulis melintas di sana, nampak kondisi sebagian jalan sudah ditutup aspal mulus. Eros mengatakan, bahwa liputan Speaker Kampung saat itu memang disengaja untuk menggugah pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan tersebut.

Liputan yang mereka lakukan, bisa memunculkan risiko. Pada tahun 2014, radio komunitas Ninanta FM melakukan liputan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, walau nampaknya tidak terlalu ditanggapi pengurus PNPM Mandiri, misalnya tidak hadir pada undangan talkshow di radio tersebut karena suatu hal. "Seperti acara *talk show* di radio kami sering mengundang pelaku PNPM, namun sering tidak menghadirinya" Jelas ingkong saat dikonfirmasi 26/3/2014 (Kampung Media, 29/3/2014). Namun untuk memenuhi akses terhadap informasi, relawan radio melakukan jemput bola, yaitu melalui wawancara langsung dengan pengurusnya.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam pembangunan, Speaker Kampung diajak oleh LSM Somasi (Solidaritas Masyarakat Untuk Transparansi) untuk menggalakkan jurnalisme warga. Menurut LSM Somasi, jurnalisme warga dapat menjadi garda depan dalam proses pengawasan pembangunan karena para relawannya merupakan warga desa yang bersangkutan, sehingga keterlibatan dalam persoalan yang ada akan berorientasi pada pemecahan masalah. Demikian juga dengan program kerja LSM Somasi terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat di tiga desa kecamatan Aikmel Lombok Timur. Pelayanan kesehatan sangat penting diperhatikan akuntabilitasnya karena hal ini merupakan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan warga. Oleh karena itu, untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, jurnalisme warga dapat bermanfaat untuk mendorong terciptanya pelayanan kesehatan yang baik oleh pemerintah (wawancara dengan Herul

Anwar, 2017). Langkah-langkah yang mereka lakukan antara lain dengan pemberdayaan warga untuk lebih mengetahui hak-hak mereka untuk mendapat pelayanan kesehatan. Pemberdayaan warga tersebut antara lain berupa pembelajaran dalam organisasi kelompok warga. Saat ini kelompok warga yang jadi fokus adalah keluarga dan atau Anak Buruh Migran, Disabilitas dan Perempuan Miskin. Mereka akan menjadi kelompok belajar, tempat berbagi informasi dan akan menjadi mitra pemerintah desa agar tercipta akuntabilitas dalam pelayanan masyarakat (speakerkampung.net, 24/3/2017) .

Mengapa LSM Somasi mengajak kerjasama Speaker Kampung? Herul yang saat ini aktif di LSM Somasi mengikuti sejak awal dan ikut berjuang mendorong hadirnya jurnalisme warga melalui media komunitas. Ia melihat perjalanan Speaker Kampung dalam mempromosikan jurnalisme warga. Herul bersama dengan Eros dan Rasyid juga yang mengawali pendirian Speaker Kampung pada tahun 2012.

Keterlibatan Speaker Kampung di dalam kegiatan jurnalisme warga sejalan dengan keinginan mereka untuk lebih terlibat dalam proses-proses pembangunan di wilayahnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendukung inisiatif Kabupaten Lombok Timur untuk membentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Berbagai KIM dari 60 desa di Lombok Timur bergabung di dalam Forum Kelompok Informasi Masyarakat (FORKIM). Dalam kaitan memaksimalkan peran warga dalam mengontrol proses pembangunan, Pada awal tahun 2017, Speaker Kampung bermitra dengan LSM Somasi akan memberdayakan masyarakat di tiga desa Kecamatan Aikmel terkait dengan isu program kesehatan. Speaker Kampung akan berfokus pada kerja-kerja jurnalisme warga untuk mendorong keberhasilan program kesehatan di kecamatan tersebut. Di sini mereka menunjukkan bahwa jurnalisme warga adalah bagian aktivitas warga untuk menjalankan hak dan kewajibannya, untuk ikut bertanggungjawab atas terciptanya perbaikan kondisi bersama. Dalam konteks ilmu sosial, aktivitas ini bisa dilihat melalui *citizenship*.

Kegiatan aktivis Speaker Kampung tidak melulu soal isu pembangunan fisik, namun juga menyentuh isu mental-spiritual. Ketika belakangan ini muncul persoalan negatif dari penyebaran informasi lewat media sosial

seperti *hoax*, mereka segera merespon dengan pendekatan literasi yang mereka namakan Batur. Nama tersebut merupakan kependekan dari baca-tulis-tutur, yang sekaligus menunjukkan rangkaian kegiatan literasi. Pengertian *hoax* secara umum adalah informasi palsu yang sengaja dibuat dan disebar untuk mempengaruhi keyakinan khalayak. Boleh dikata ini adalah bentuk tipuan atau manipulasi informasi yang canggih sehingga *hoax* dianggap sebagai informasi benar. *Hoax* ini bukan hasil dari interpretasi berbeda pada suatu peristiwa namun lebih merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pembuatnya untuk membelokkan kebenaran.

Pengaruh *hoax* dapat terjadi oleh karena rendahnya literasi media di masyarakat, yang dapat dilihat pada: minimnya usaha untuk melakukan verifikasi atas informasi yang diterima, motivasi untuk menjadi yang pertama dalam penyebaran informasi, serta tidak ada sumber informasi (seperti media arus utama) yang dianggap kredibel untuk mendapat verifikasi.

Literasi media sendiri bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, di mana mereka diberdayakan untuk memiliki kompetensi memanfaatkan informasi. Bahkan mereka bisa terlibat dalam proses produksi informasi. Cita-cita media komunitas untuk menempatkan masyarakat sebagai pihak yang aktif, sejalan dengan ide dasar literasi media. Frank Biocca (1988) membedakan *audience* atau khalayak menjadi khalayak aktif dan pasif. Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh khalayak aktif adalah: Pertama, khalayak aktif dianggap selektif ketika mengkonsumsi media yang akan digunakan. Kedua, utilitarianisme (*utilitarianism*), khalayak dianggap aktif apabila ketika mengkonsumsi suatu media selalu dilatarbelakangi kepentingan dan tujuan. Mereka mengkonsumsi media untuk memenuhi kepentingan serta kebutuhan yang mereka miliki. Karakteristik yang ketiga adalah *intensionalitas* (*intentionality*), yaitu menggunakan secara sengaja. Dalam konteks ini, khalayak harus bersikap aktif ketika mengkonsumsi suatu media tidak hanya 'sekedarnya' menonton saja. Artinya, saat menonton, mereka memiliki tujuan untuk memperoleh manfaat positif. Keempat, keikutsertaan (*involvement*), yaitu alasan yang selalu menyertai ketika mereka mengkonsumsi media. Kelima, khalayak aktif dianggap sebagai khalayak yang tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah dibujuk oleh rayuan media (Littlejohn & Gray, 2001, p. 333).

Mengingat remaja merupakan pengguna media sosial, maka bagi aktivis Speaker Kampung, salah satu cara untuk menangkal *hoax* adalah dengan memperkuat pengetahuan remaja sehingga pengetahuan tersebut menjadi filter diri dari serbuan *hoax*. Pengetahuan antara lain diperoleh dengan banyak membaca. Namun agar menjadi pembaca aktif, mereka diminta untuk menulis hal-hal menarik dari bacaan tersebut, lalu membagikannya (lewat tuturan) kepada teman-temannya. Penulis melihat sendiri di SMP Islam Bilakembar, siswa-siswa mempraktekkan kegiatan BATUR ini. Dan bukan kebetulan jika salah satu guru sekolah tersebut, Rasyid Ridho, adalah termasuk pelopor Speaker Kampung.

Penulis menilai bahwa proses kegiatan BATUR berpotensi untuk membangun kesadaran peserta tentang “dunianya” atau lingkungan sekitarnya, karena ada proses penyerapan informasi, refleksi atas informasi dan sharing informasi. Artinya, informasi yang mereka dapatkan tidak mentah-mentah ditelan. Berdasar obrolan dengan Eros, salah satu pendiri Speaker Kampung, agar proses kegiatan Batur memberi inspirasi bagi yang lain, maka kegiatan tersebut disebarakan melalui Speaker TV, salah satu media dari Speaker Kampung.

Pendowo FM.

1. Profil Siaran Pendowo FM

Pendowo FM merupakan radio komunitas yang berbasis di Desa Balongbendo, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo. Paguyuban dipilih sebagai bentuk lembaga Pendowo FM, dengan demikian secara otomatis yang menjadi target utama adalah anggota paguyuban Pendowo. Sedangkan mayoritas anggota Pendowo ditilik dari status sosialnya 90% adalah kalangan menengah ke bawah. Sementara profesi yang dilakukan adalah 60% pedagang dan pengusaha *home industri*. Secara umum segmentasi yang dibidik oleh Pendowo FM adalah kalangan pelaku usaha kecil dan mikro yang perlu bantuan pengembangan untuk usaha. Bila dikelompokkan dalam strata pendidikan yang dibidik oleh Pendowo FM adalah kalangan berpendidikan menengah ke bawah. Sehingga dalam menyampaikan substansi isi siaran Pendowo FM selalu berpegang pada rumus menggunakan obat, penyesuaian dosis, dan ketepatan penyampaian.

Dengan segmentasi pendengar kalangan bawah dan berprofesi sebagai pelaku usaha kecil dan menengah, maka Pendowo FM memilih

format siaran yang mengedepankan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat melalui ceramah serta diskusi. Beberapa program unggulannya diantaranya Wawasan Kebangsaan bersama Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dari Pengajian Padhangmbulan, Bangbang Wetan dan Forum lain yang dipandu Cak Nun (*recorded*). Menurut Widodo Wawasan Kebangsaan diunggulkan karena ideologi non-kebangsaan saat ini mulai mempengaruhi warga Balongbendo, seperti ideologi agama Islam kanan yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (Wawancara 18 Januari 2017). HTI masuk dan mempengaruhi warga lewat ruang-ruang pertemuan warga, pengajian, khotbah Jumatan di Masjid, dan sebagainya. Pendowo FM punya kewajiban untuk menyebarluaskan pandangan Islam yang berorientasi pada ranah kebangsaan, oleh karenanya dimunculkan ide program Wawasan Kebangsaan tersebut. Masih menurut Widodo, Pendowo FM dalam memformat siarannya memposisikan diri sebagai sarana pencerahan bagi masyarakat, mengupas berbagai permasalahan yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dengan landasan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial demi terangkatnya martabat bangsa.

2. Ruang Diskusi Pendowo FM

Sebagai bagian dari aktivitas Pendowo FM sebagai radio komunitas, ruang diskusi menjadi hal yang mutlak diperlukan. Ruang diskusi tersebut mewadahi para pendengar Pendowo FM yang ingin jumpa darat, serta berdiskusi mengenai hal-hal yang terjadi di sekitar khususnya di Desa Balongbendo dan Kecamatan Balongbendo. Widodo (wawancara 18 Januari 2017) mengungkapkan bahwa sejak tahun 2015 Pendowo FM menginisiasi pembukaan warung kopi di pelataran studio Pendowo FM. Warung kopi tersebut diberi nama De Brother Kafe yang menggabungkan konsep warung kopi dengan perpustakaan mini. Perpustakaan dihadirkan supaya pengunjung dapat menikmati kopi sekaligus membaca buku. Pengelolaan kafe tersebut dipercayakan kepada Kandar, orang muda yang sejak awal bergabung dengan Pendowo FM.

Produk yang disajikan oleh kafe ini terdiri dari 18 macam kopi nusantara, yang didatangkan langsung dari para petani kopi di daerah terutama di Sidoarjo dan sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pendowo FM memiliki kepedulian untuk mengangkat potensi daerah, dalam hal ini kopi dan segala hasil bumi lainnya.

3. Pendowo Gugah Nusantara

Selain kafe De Brother, Pendowo FM juga menginisiasi pendirian lembaga sosial masyarakat Pendowo Gugah Nusantara. Menurut Widodo (wawancara 18 Januari 2017) Pendowo Gugah Nusantara merupakan lembaga sosial masyarakat yang secara khusus memberi perhatian kepada penerapan UU No. 6/2014 - selanjutnya disebut UU Desa - juga Sistem Informasi Desa (SID) baik desa-desa di kecamatan Balongbendo maupun desa lain yang berada di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya Pendowo Gugah Nusantara bekerja sama dengan aparat desa setempat, melatih dan memberikan pemahaman lebih lanjut kepada pimpinan dan staf mengenai UU Desa & SID.

Salah satu kegiatan yang pernah dilaksanakan Pendowo Gugah Nusantara ialah Pelatihan SID (Sistem Informasi Desa) dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Mojowarno pada hari Selasa & Rabu 27-28 Oktober 2015. Sebagaimana ditulis di website resmi pemerintah Kabupaten Jombang¹, pelatihan tersebut yang diikuti oleh Sekdes/Staf Desa se Kecamatan Mojowarno. Pendowo Gugah Nusantara hadir sebagai narasumber/pendamping juga LSM Combine dari Yogyakarta. Pelatihan SID ini berfungsi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang berbasis kebutuhan di tingkat lokal/desa, termasuk adanya ketersediaan data yang bisa dimanfaatkan di tingkat desa, membantu proses perencanaan desa sebagai kekayaan data dalam menyusun dokumen perencanaan desa, serta untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pembangunan di tingkat desa.

Pelatihan-pelatihan serupa sudah dilaksanakan juga oleh Pendowo Gugah Nusantara di beberapa desa di sekitar Sidoarjo seperti di Magetan, Malang, Pasuruan, dan sebagainya. Adapun beberapa poin dari UU Desa yang secara khusus diberi perhatian oleh Pendowo Gugah Nusantara ialah:

Dana miliaran rupiah akan masuk ke kas Desa. Sebagaimana diketahui bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN lebih kurang 1 miliar per tahun. Dana yang besar ini harus dikelola dengan baik dan diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tidak cukup hanya mengandalkan

¹ <http://www.jombangkab.go.id/index.php/web/entry/5698-pelatihan-sistem-informasi-desa-bagi-sekdesstaf-desa-se-kecamatan-mojowarno-tahun-2015.html>

komite anti korupsi perangkat desa, namun juga harus menciptakan sistem anggaran yang transparan dan partisipatif.

Penghasilan kepala desa. Menurut pasal 66 UU Desa, kepala desa atau yang disebut lain (nagari) memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota ditetapkan oleh APBD. Pengawasan terhadap kerja kepala desa mutlak diperlukan, supaya berimbang antara besaran hak yang diterima dengan kewajiban yang dilakukannya.

Kewenangan kepala desa. Dalam UU Desa dinyatakan tentang pembagian kewenangan tambahan dari pemerintah daerah yang merupakan kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu adanya peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Desa. Bagi Pendowo Gugah Nusantara, hal ini harus dikontrol supaya kepala desa dapat bertugas dengan benar, proporsional, serta jauh dari peluang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Masa jabatan kepala desa bertambah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut (pasal 19). Demikian juga dengan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa, mereka bisa menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan, baik secara berturut turut maupun tidak berturut-turut. Berbeda dengan peraturan perundangan sebelumnya, masa jabatan kali ini ditambah 1x yang memberi kesempatan kepala desa menyelesaikan program kerja yang dirancangnya.

Penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Menurut pasal 55 UU Desa yang baru, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi; membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sistem Informasi Desa (SID). Berbagai aturan mengenai Sistem Informasi Desa (SID) tertuang dalam Pasal 86 yang merujuk kepada Sistem Informasi Desa dan Pembangunan Kawasan. Isi pasal tersebut sebagai berikut:

- a. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi

Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- c. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
- d. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
- e. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
- f. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Dari uraian di atas dapat dilihat hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah pentingnya sumber daya manusia sebagai bagian dari Sistem Informasi Desa menunjukkan kewajiban pada pihak Kabupaten/Kota untuk memberikan pendampingan dan penguatan atas tata kelola informasi dan data pembangunan di tingkat desa. Aspek pendampingan inilah yang diisi oleh LSM Pendowo Gugah Nusantara, mengingat tidak banyak organisasi non-pemerintah yang menguasai substansi maupun teknis Sistem Informasi Desa (SID). Jadi Pendowo FM menjadi penggagas di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam soal optimalisasi Sistem Informasi Desa (SID) untuk kemajuan pembangunan desa.

4. Pengawasan Pembangunan Pendowo FM – Dana Desa Balongbendo

Dana Desa (DD) adalah dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat kepada desa agar digunakan untuk percepatan pembangunan desa dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 desa mendapat kucuran anggaran yang berlimpah bila dibandingkan sebelum adanya undang-undang desa diberlakukan, disamping DD masih ada lagi Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak (BHP), Bagi Hasil Retribusi (BHR) dan Bantuan Keuangan Daerah maupun Propinsi. Pendowo FM sebagaimana diungkapkan oleh Widodo (wawancara 18 Januari 2017) menyatakan

halwa banyaknya dana yang dikelola oleh pemerintah desa akhirnya mendorong pengelolaan yang akuntabilitas dan transparan. Tentunya ini memerlukan beberapa prasyarat utama yaitu kemauan pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa dengan baik juga kapasitas aparat pemerintah desa yang mempunyai kecakapan yang layak.

Dalam tatakelola desa kemauan setiap aparat untuk mengelola keuangan dengan baik dan transparan menjadi syarat utama. Jika aparat desa masih mempunyai kekurangan kemampuan bisa meng-*'upgrade'* diri dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan Pemerintah tingkat di atasnya atau Pelatihan aparat desa yang dilakukan desa secara mandiri.

Ada persoalan yang hampir umum terjadi di setiap daerah, yaitu dengan adanya keuangan desa yang besar menimbulkan kecurigaan berbagai pihak bahwa keuangan desa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Sehingga, kecurigaan tersebut menjadi isu utama di kalangan masyarakat desa yang potensial menimbulkan gejolak sosial di desa.

Dengan banyaknya berita maupun iklan layanan masyarakat yang menyampaikan bahwa desa sudah memperoleh anggaran dana berbagai sumber membuat warga paham berapa anggaran yang dikelola desa. Tentunya dengan dana besar yang diterima desa sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pemdes. Namun, kadang dengan perencanaan yang kurang matang pembangunan yang dilakukan oleh pemdes kurang dirasakan oleh masyarakat.

Semestinya pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh desa yang bisa disebut dengan istilah "Pembangunan Partisipatif". Hal ini untuk mengeliminasi kecurigaan berbagai pihak bahwa tidak ada penyelewengan dan anggaran desa digunakan semestinya. Warga bisa bertanya-tanya Pemdes melakukan pengawasan. Dalam tatakelola yang baik bisa juga kerja Pemdes didukung aplikasi yang disediakan pemerintah maupun lembaga lain yang menyediakan aplikasi Non berbayar seperti SID dari Combine Yogyakarta atau Siskesdes yang di release oleh BPKP.

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap Speaker Kampung & Pendowo FM, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: bahwa media

komunitas mendorong munculnya model pembangunan partisipatif, model pembangunan inilah yang bisa menanggulangi kecurigaan berbagai pihak komponen masyarakat yang ada di desa. Yang menjadi persoalan adalah apabila warga tidak merasakan perubahan yang signifikan akibat pembangunan desa. Hal ini akan menimbulkan pertanyaan, mengapa anggaran desa yang besar tersebut tidak bisa dirasakan hasilnya oleh warga. Bila isu ini dikelola oleh pihak yang berseberangan dengan Pemdes akan menjadi pemicu gejolak sosial di desa.

Solusi berbagai hal tersebut adalah tatakelola desa yang baik, transparan dan melibatkan partisipatif warga dalam melakukan pembangunan desa. Kemudian, jangan melupakan bahwa desa sebagai entitas pemerintahan yang masih memegang azas asal-usul dan adat istiadat yang sudah turun temurun dari generasi ke generasi. Desa jangan merubah dirinya menjadi kota, meskipun suasana sudah seperti kota, tetaplah berjalan sebagai desa dengan adat istiadat dan budayanya.

Referensi

- Biocca, F. (1988). Opposing conceptions of the audience: the active and passive hemispheres of communication theory. In J. A. Anderson (Ed.), *Communication Yearbook 11* (pp. 51-80). New York: Routledge.
- Creeber, Glen & Martin, Royston. (2009). *Digital Cultures: Understanding New Media*, London: McGraw-Hill Open University Press.
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna. (1994). *Handbook of Qualitative Research*, New York: Sage Publications.
- Goodspeed, R. (2015). 'Smart Cities: Moving Beyond Urban Cybernetics to Tackle Wicked Problems', *Revue Economique et Sociale*, vol. 8, no. 1, hh. 79-92.
- Hague, Barry N. & Brian D.Loader. (1999). *Digital Democracy: Discourse and The Decision Making in The Information Age*, New York: Routledge.
- Jahja, Rangoaini, Haryana, Mariana, Dina, Rendra, Meldi. (2012). *Sistem Informasi Desa: Sistem Informasi Desa dan Data untuk Pembaruan Desa*, Yogyakarta: Combine Resources Institutions.
- Kampung Media, 29/3/2014. "Tantangan Media Komunitas Ditengah Program Pemerintah". Diakses pada tanggal 25 Maret 2017 dari <http://pelayanan-publik.kampung-media.com/2014/03/29/tantangan-media-komunitas-ditengah-program-pemerintah-1966>
- Lievrouw, Leah A. & Sonia Livingstone. (2006). *Handbook of New Media: Social Shaping and Social Consequences of ICTs*, London: Sage Publications.
- Lievrouw, Leah A. (2011). *Alternative and Activist New Media; Digital Media and Society Series*: Cambridge: Polity Press.
- Littlejohn, S. W., & Gray, R. (2001). *Theories of Human Communication* (7th ed.). Belmont: Wadsworth Publishing Company
- Nuswantoro, Ranggabumi. (2016). 'Keseimbangan Informasi', *Harian Bernas Jogja*, 20 Desember, h. 5.
- Pawito, 2007, 'Media Komunitas dan Media Literacy', *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 4, no. 2, hh. 167-177.
- Portal Desa Ketangga, tanpa tanggal. Diakses pada tanggal 20 Maret

- 2017 dari <http://ketanggalomboktimur.desa.kemendesa.go.id/pages/detail/58-penduduk-dan-tenaga-kerja>
- Radar Lombok, 28/7/2016. "Kasus Pernikahan Dini di Lotim Masih Tinggi." Diakses pada tanggal 29 Maret 2017 dari <http://www.radarlombok.co.id/kasus-pernikahan-dini-lotim-masih-tinggi.html#>
- Rennie, Ellie, 2006, *Community Media: A Global Introduction*, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers. Inc.
- Rogers, Everett M. (1986). *Communication Technology: The New Media in Society*, New York: The Free Press.
- Speakerkampung.blogspot, 16/5/2016. "LPA Lotim Dukung Gerakan Anak Dalam Antisipasi Kejahatan". Diakses pada tanggal 1 Februari 2017 dari <http://speakerkampung.blogspot.co.id/2016/05/lpa-lotim-dukung-gerakan-anak-dalam.html#more>
- Speakerkampung.net, 24/3/2017. "Somasi NTB, Kuatkan Pengetahuan Warga Untuk Mendapatkan Pelayanan." Diakses pada tanggal 2 April 2017 dari <http://speakerkampung.net/somasi-ntb-kuatkan-pengetahuan-warga-mendapatkan-pelayanan/>
- West, R., & Turner, L. H. (2009). *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Winston, David. (2003). Digital Democracy and the New Age of Reason dalam *Democracy and New Media*, Henry Jenkins dan David Thorburn (Eds), Cambridge: The MIT Press.